



**URGENSI PENERAPAN REDENOMINASI RUPIAH  
DALAM BIDANG KEUANGAN NEGARA**

Hoirotus Sya'baniyah Firliyanti  
Politeknik Keuangan Negara STAN  
Alamat Korespondensi : lelyfirliyanti@gmail.com

**INFORMASI ARTIKEL**

Diterima Pertama  
28 Juni 2019

Dinyatakan Diterima  
11 Oktober 2019

**KATA KUNCI:**  
Redenominasi, rupiah, SWOT, keuangan negara

**KLASIFIKASI JEL:**  
E60, G20

**ABSTRAK**

*The issue of applying rupiah redenomination needs to be studied more profound. This policy not only focused on simplifying the nominal currency for the ease of financial transactions and increasing credibility, but also on the negative impacts that will be caused, both from the economic and psychological side of the society, need to be reconsidered. This paper aims to determine whether redenominations is currently needed for its application in Indonesia. Research uses secondary data in the form of previous studies combined with qualitative methods through analysis by comparing the external factors of opportunities and threats with the facts of internal strenghts and weaknesses. The analysis result shows that redenomination can be implemented if the fundamental conditions of the Indonesian economy have stabilized. The government also must be able to ensure redenomination is implemented at the right timing, that is, when economic conditions are stable, the inflation rate is maintained, economic growth is in good condition, there are support and trust from the public, as well as the availability of the state budget for redenomination as a priority.*

Isu penerapan redenominasi rupiah perlu dikaji lebih dalam. Kebijakan ini bukan hanya berfokus pada penyederhanaan nominal mata uang untuk kemudahan transaksi keuangan dan peningkatan kredibilitas, tetapi juga dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan, baik dari sisi ekonomis maupun psikologis masyarakat, perlu dipertimbangkan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah saat ini redenominasi sangat diperlukan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu yang dipadukan dengan metode kualitatif melalui analisis dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan fakta internal kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*). Hasil analisis menunjukkan bahwa redenominasi bisa diimplementasikan apabila kondisi fundamental perekonomian Indonesia telah stabil. Pemerintah juga harus mampu memastikan redenominasi diimplementasikan pada *timing* yang tepat, yakni saat kondisi ekonomi stabil, laju inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi dalam kondisi baik, adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, serta ketersediaan anggaran negara untuk redenominasi sebagai prioritas.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu isu yang menarik untuk diperbincangkan dalam dunia perekonomian negara kita adalah redenominasi, penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit rupiah tanpa mengurangi nilai riil-nya (Pambudi, Juanda, & Priyarsono, 2014). Ide untuk melakukan redenominasi sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia (Permana, 2015). Karena sesungguhnya Indonesia pernah melakukan redenominasi rupiah pada tanggal 13 Desember 1965 (Bank Indonesia, 2005). Permana (2015), juga menambahkan bahwa pelaksanaan program redenominasi tersebut mengalami kegagalan karena dilaksanakan pada saat Indonesia sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi. Hal ini didukung dengan pernyataan Fajar (2012) yang mengungkapkan bahwa kegagalan redenominasi di Indonesia dibuktikan dengan terjadinya *hyperinflation* tahun 1966 sebesar 650%.

Rencana redenominasi rupiah pertama kali dilontarkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, pada tanggal 3 Agustus 2010 (Febrida & Karolina, 2016). Bukan tanpa pertimbangan, saat ini transaksi pemerintah seperti Nota dan RAPBN sudah mencapai 16 digit. Padahal, pecahan mata uang yang terlalu besar dinilai kurang efisien dalam proses pembayaran dan pencatatan transaksi keuangan. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Hal ini diungkapkan oleh Permana (2015) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup tinggi, tingkat inflasi terjaga baik, nilai tukar rupiah stabil, dan akumulasi jumlah cadangan devisa yang mencukupi kebutuhan transaksi ekonomi. Dua faktor utama inilah yang menjadi landasan penting mengapa Bank Indonesia mengeluarkan wacana penerapan kebijakan redenominasi.

Namun bila kita berkaca pada negara lain yang sukses melaksanakan redenominasi, terdapat faktor penting yang menjadi pembeda. Faktor utama (*most dominant driving factor*) yang mendorong suatu negara memutuskan untuk melakukan redenominasi mata uang yakni tingginya tingkat inflasi (Suhendra & Handayani, 2012). Sedangkan menurut Febrida dan Karolina (2016) rencana redenominasi rupiah semata-mata hanya untuk penyederhanaan nominal mata uang. Selain itu untuk melaksanakan redenominasi diperlukan *timing* yang tepat dan persiapan yang matang terkait perubahan mendasar dalam sistem keuangan kita (Amir, 2013). Sedangkan di sisi lain, akhir-akhir ini Indonesia tengah mengalami depresiasi nilai rupiah hingga mencapai Rp15.227 terhadap dollar (data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia). Besarnya volatilitas yang terjadi pada mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain ditunjukkan oleh

naik turunnya nilai tukar mata uang tersebut di pasar uang (apresiasi/depresiasi) (Chou, 2000). Bila mata uang mengalami volatilitas ekstrim, maka perekenomian akan mengalami ketidakstabilan dari sisi makro maupun mikro (Mukhlis, 2011).

Redenominasi juga dianggap penting bagi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi pasar, salah satunya yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mada (2017) menjelaskan bahwa keberadaan MEA ditujukan untuk menciptakan suatu pasar besar kawasan ASEAN yang akan berdampak besar terhadap perekonomian negara anggotanya. Oleh karena itu agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi diperlukan penyetaraan ekonomi. Padahal, kondisi yang terjadi saat ini adalah nilai tukar Indonesia belum dipandang setara dengan mata uang negara ASEAN lainnya karena bila dikonversikan ke USD nilai tukar rupiah masih terbilang kecil (Permana, 2015). Berlatar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan penelitian urgensi penerapan redenominasi rupiah dan kaitannya dengan keuangan negara.

### 1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan pertanyaan yang sudah disampaikan, tujuan dari penulisan ini adalah mencari bukti empiris dan mengetahui apakah redenominasi rupiah perlu diterapkan untuk menjadi solusi permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini.

Harapannya, hasil penulisan ini dapat memberikan pandangan baru bagi pembaca dalam menilai keurgensian pelaksanaan kebijakan redenominasi di Indonesia. Penulisan ini juga diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan redenominasi rupiah dari beberapa pandangan melalui penelitian para ahli terdahulu.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1. Redenominasi

Redenominasi adalah penyederhanaan jumlah digit pada denominasi atau pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukar rupiah terhadap harga barang dan/ atau jasa (Hardiyanto, 2013). Pengertian lain menyebutkan bahwa redenominasi adalah suatu proses di mana mata uang baru menggantikan mata uang lama dengan suatu rasio tertentu (Dogarawa, 2007). Sedangkan Iona (2005) menjelaskan bahwa redenominasi merupakan penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera pada mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar itu sendiri, disertai dengan penyesuaian harga komoditas di pasaran dan nilai tukar dengan valuta asing. Secara lebih sederhana, redenominasi adalah penyederhanaan penyebutan atau penulisan denominasi mata uang suatu negara (Permana, 2015).

Mosley (2005) mengungkapkan bahwa redenominasi juga bisa disebut sebagai reformasi mata uang dan memiliki fungsi sebagai jalan pintas terakhir (*last of resort*) bagi otoritas moneter ketika terjadi inflasi ekonomi yang berlebihan, di mana mata uang domestik telah kehilangan nilai yang signifikan secara lokal dan internasional sebagai upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dalam ekonomi dalam negeri dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di dalamnya.

Tanggal 3 Agustus 2010, Gubernur Bank Indonesia merencanakan untuk melakukan redenominasi yang dilatarbelakangi kondisi inflasi yang tinggi, sehingga nilai mata uang terhadap barang semakin rendah dalam waktu singkat dan nilai nominal dalam mata uang semakin besar (Amir, 2013). Ide untuk melakukan redenominasi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Permana (2015), menyatakan bahwa praktik penyederhanaan digit mata uang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, misalnya di restoran, hotel, dan pasar tradisional. Penyederhanaan dilakukan dengan menuliskan 3 digit angka nol di belakang lebih kecil dibandingkan angka di depannya atau langsung menghilangkan 3 digit angka nol di belakang.

Kebijakan redenominasi tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengefisienan perhitungan dalam sistem pembayaran di Indonesia (Hardiyanto, 2013). Febrida dan Karolina (2016), juga memaparkan bahwa redenominasi akan menjadikan pencatatan data keuangan lebih efisien, menciptakan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan regional, serta meningkatkan martabat rupiah. Lianto dan Suryaputra (2012) telah melakukan penelitian dengan metode survei sebanyak 100 orang yang paham akan redenominasi, terlihat bahwa dampak terbesar dari redenominasi adalah meningkatkan kredibilitas Indonesia dia mata negara lain. Temuan lainnya adalah masyarakat Indonesia menganggap redenominasi akan menguntungkan mereka, karena jika sukses diimplementasikan maka mata uang rupiah akan menjadi semakin kuat dan menambah kepercayaan diri masyarakat terhadap mata uangnya.

Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh penerapan kebijakan redenominasi, salah satunya yaitu kemungkinan masyarakat salah persepsi dengan mengira redenominasi adalah sanering yang akhirnya dapat menimbulkan kepanikan berujung gejala ekonomi (Pambudi, Juanda, & Priyarsono, 2014). Selain itu juga disebutkan bahwa biaya operasional perusahaan dan perbankan akan meningkat karena redenominasi menuntut adanya penggantian sistem

informasi dan teknologinya, serta membutuhkan waktu penyesuaian untuk menerapkan teknologi akuntansi dan penyesuaian dengan penyederhanaan nominal. Pambudi, Juanda, & Priyarsono (2014) menambahkan bahwa Bank Indonesia juga akan mengeluarkan biaya besar untuk mencetak uang baru hasil redenominasi dan sosialisasi publik. Selain itu dampak sosial lainnya yakni berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap rupiah (Kesumajaya, 2011).

Wibowo (2013), mengungkapkan bahwa dampak lain yang akan muncul karena perubahan nominal mata uang adalah bias psikologis yang disebut *money illusion*, yakni perubahan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa harga barang menjadi lebih murah karena dihilangkannya nilai nol dari mata uang terdahulu. *Money illusion* akan berujung pada meningkatnya *willingness to pay* (kemauan untuk membayar) dari konsumen karena merasa harga yang baru lebih murah dibandingkan harga sebelum redenominasi. Melihat perubahan tersebut, produsen akan terus meningkatkan harga hingga batas yang masih ditolerir konsumen (Pambudi, Juanda, & Priyarsono, 2014). Peningkatan harga pada seluruh produk barang dan jasa inilah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya inflasi.

Amir (2013), menyatakan bahwa wacana Indonesia untuk melakukan redenominasi rupiah perlu menjadi pemikiran yang mendalam. Dari 50 negara yang pernah mengaplikasikan redenominasi (Iona, 2005), di antaranya yang sukses yakni Turki, Polandia, dan Rumania disebabkan karena redenominasi dilakukan pada saat kondisi ekonomi negara stabil. Sedangkan negara yang gagal melakukan redenominasi seperti Brasil, Nigeria, Ghana, dan Zimbabwe (Palupi, 2011), disebabkan karena redenominasi dilakukan saat ekonomi sedang mengalami guncangan. Karena itu jika Indonesia ingin melakukan redenominasi, maka kondisi ekonomi harus stabil, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, serta inflasi terkendali dan rendah (Amir, 2013).

Melalui studi literatur tentang redenominasi, bisa ditarik dugaan awal bahwa redenominasi masih belum diperlukan penerapannya di Indonesia. Hipotesis ini dirumuskan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan lebih banyak daripada dampak positifnya.

## 2.2. Analisis SWOT

Analisis SWOT dapat diartikan sebagai identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*)

(Rangkuti, 2006). Sebagai salah satu alat yang berguna dalam pengambilan keputusan dunia bisnis, metode analisis SWOT bisa memberikan analisa yang baik, efektif, dan efisien sehingga mampu menemukan dan mengenali banyak kemungkinan terkait dengan inovasi bisnis (Noor, 2014). Zuhrotun Nisak (2014) menjelaskan ada 4 strategi yang digunakan untuk menyusun matrik SWOT, yakni strategi *Strengths-Opportunities*, *Strengths-Threats*, *Weakness-Opportunities*, dan *Weakness-Threats*.

### 2.3. Redenominasi bukan Sanering

Redenominasi berbeda dengan sanering. Sanering merupakan upaya memotong rupiah karena melejitnya angka inflasi yang tak kunjung turun atau inflasi tidak terkendali (FE, 2011). Sanering juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan penghilangan angka nol pada mata uang yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena pemotongan tersebut tidak dilakukan pada harga-harga barang (Pambudi, Juanda, & Priyarsono, 2014).

Berbeda dengan sanering yang bertujuan mengurangi jumlah uang beredar, redenominasi hanya menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam transaksi keuangan. Perubahan nilai uang terhadap barang juga menjadi lebih kecil karena

sanering memang dimaksudkan untuk menurunkan daya beli masyarakat saat kondisi makroekonomi tidak sehat. Sementara redenominasi sama sekali tidak mengubah nilai uang terhadap barang dan biasanya diterapkan saat kondisi makroekonomi dengan stabil.

Mada (2017) mengatakan bahwa sanering biasanya menjadi sebuah pilihan pahit yang harus dilakukan pemerintah apabila kondisi perekonomian sedang mengalami kenaikan harga-harga secara eksekif (hiper inflasi) dan berlebihnya jumlah uang beredar. Indikatornya bisa berupa rendahnya Produk Domestik Bruto, merosotnya nilai investasi, dan tingginya inflasi sehingga nilai rupiah anjlok. Karena situasi yang genting ini, sanering biasanya dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya masa transisi terlebih dahulu. Ketidaksiapan kebijaksanaan tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya gejolak ekonomi dan kepanikan di tengah masyarakat (Hardiyanto, 2013). Tak hanya itu, kesalahan persepsi pada masyarakat yang menganggap redenominasi adalah sanering bisa menimbulkan kepanikan yang dapat membuat situasi ekonomi bergejolak (Pambudi, Juanda, & Priyarsono, 2014). Dengan demikian diperlukan adanya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat bahwa redenominasi berbeda dengan sanering (Mada, 2017).

Tabel 1. Perbedaan Redenominasi dan Sanering

| Aspek                      | Perbedaan   |   |
|----------------------------|---|---|
|                            | Redenominasi  | Sanering  |
| Pengertian                 | Redenominasi rupiah adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. | Sanering rupiah adalah pemotongan nilai uang.                                   |
| Dampak bagi masyarakat     | Tidak ada kerugian karena daya beli tetap.  | Menimbulkan kerugian karena daya beli masyarakat menurun drastis.               |
| Tujuannya                  | Menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam transaksi.  | Mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga akibat hiperinflasi.  |
| Nilai uang terhadap barang | Nilai uang tidak berubah karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan.   | Nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil karena pemotongan nilai. |
| Kondisi saat dilakukan     | Kondisi makroekonomi stabil, ekonomi tumbuh, dan inflasi terkendali.  | Kondisi makroekonomi tidak sehat dan inflasi sangat tinggi.                     |
| Masa transisi              | Matang dan terukur sampai masyarakat siap agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.   | Tidak ada masa transisi dan dilakukan secara tiba-tiba.                         |

Sumber: (Redenominasirupiah.com, 2013b), diolah.

### 2.4. Stabilitas Ekonomi dan Sistem Keuangan

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah merupakan tujuan pokok Bank Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2009. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari perkembangan laju inflasi serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (FE, 2011). Dosen FE (2011) dalam jurnalnya juga

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Selain itu, dia juga menambahkan bahwa apabila suatu negara yang kondisi mekanisme ekonominya dalam hal ini adalah penetapan harga,

alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan negara tersebut stabil.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi stabil artinya tidak berubah-ubah, tetap, dan tidak naik turun. Kestabilan artinya perihal (yang bersifat) stabil. Kestabilan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai sifat tetap dan mampu untuk seimbang dalam menghadapi keadaan bagaimanapun (Chotimah, 2010). Sedangkan arti kata ekonomi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan usaha manusia untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan sarana (sumber daya) yang terbatas (Gilarso, 2004).

Penerapan redenominasi bukan hanya akan berdampak pada ekonomi secara mikro, namun juga pada kondisi makroekonomi suatu negara. Stiglitz (1997) dan Dornbusch et al. (1998) menyebutkan bahwa variabel kunci indikator ekonomi makro adalah inflasi, kesempatan kerja pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan (proksi dari neraca pembayaran). Stabilitas ekonomi makro dapat dilihat dari pengaruh guncangan kebijakan harga pangan atau variabel ekonomi makro lainnya terhadap variabel kunci indikator ekonomi makro. Jika suatu guncangan menimbulkan fluktuasi yang besar pada variabel ekonomi makro, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro sedang rentan. Sebaliknya, jika dampak yang ditimbulkan akibat fluktuasi kecil, maka dapat disimpulkan stabilitas ekonomi makro stabil (Ilham & Siregar, 2007).

### 2.5. Keuangan Negara

Definisi Keuangan negara menurut Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara Ichwan (1989) mengartikan keuangan negara sebagai rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angka-angka yang antara lain diwujudkan dalam mata uang, yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun. Sehingga, penelitian keuangan negara dapat diartikan sebagai bentuk upaya mempelajari dan menemukan suatu pengetahuan dan inovasi baru dalam lingkup keuangan negara.

Lingkup keuangan negara yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah ketersediaan anggaran negara. Subagio (1988) mendefinisikan anggaran negara sebagai suatu rencana yang diperlukan untuk membiayai segala kegiatan negara serta biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disertai

taksiran besarnya penerimaan yang didapat dan digunakan untuk membelanjakan pengeluaran tersebut. Seperti yang dijelaskan Pambudi, Juanda, & Priyarsono (2014), bahwa redenominasi akan memakan biaya operasional perusahaan dan perbankan yang cukup besar atas tuntutan penggantian sistem informasi dan teknologinya. Ketersediaan anggaran negara juga sangat dibutuhkan sebagai biaya pencetakan uang baru dan sosialisasi publik oleh Bank Indonesia.

Dikutip dari pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro, yang menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penggunaan anggaran negara pada infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang telah dituangkan dalam Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Selain itu, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 juga telah mengalokasikan anggaran negara sebagai sumber pendanaan 5 pokok prioritas nasional, meliputi pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, nilai tambah sektor riil, ketahanan pangan, dan stabilitas pertahanan keamanan (Bappenas, 2019).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Creswell (2009) menjelaskan, metode kualitatif merupakan sarana untuk mengeksplor dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Creswell juga menambahkan bahwa melalui penelitian kualitatif ini, peneliti akan mampu menginterpretasikan makna melalui pertanyaan-pertanyaan, prosedur, dan analisis data secara induktif.

Penulisan ini menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yang didasari oleh penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa data juga bersumber dari Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Studi literatur juga dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, *website*, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah redenominasi. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis SWOT, yakni analisis dengan membandingkan antara faktor eksternal (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan fakta internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) (Nisak, 2014).

## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1. Analisis Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan internal yang paling utama dalam penerapan kebijakan redenominasi adalah kestabilan perekonomian suatu negara. Permana (2015), mengatakan bahwa ketersediaan uang rupiah dengan jumlah yang cukup dan dalam pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk memelihara perkembangan perekonomian nasional yang dinilai telah berkesinambungan. Hal ini dibuktikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia mengalami kemajuan yang sangat baik. Tingginya pertumbuhan ekonomi, terjaganya tingkat inflasi, stabilnya nilai tukar rupiah, serta tercukupinya kebutuhan transaksi ekonomi melalui akumulasi jumlah cadangan devisa.

Ide untuk melakukan redenominasi bukanlah hal yang baru. Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari praktik penyederhanaan digit mata uang sudah banyak dilakukan masyarakat, seperti di restoran, hotel, dan pasar tradisional. Penyederhanaan dilakukan dengan menuliskan 3 digit angka nol di belakang lebih kecil dibandingkan angka di depannya atau langsung menghilangkan 3 digit angka nol di belakang (Permana, 2015). Hal ini membuktikan bahwa secara tidak langsung redenominasi sudah mulai diterapkan dari lapisan masyarakat sendiri dan nantinya akan mempermudah dalam sosialisasi penerapan redenominasi.

Kekuatan-kekuatan tersebut sangat mendukung pelaksanaan redenominasi yang akan menjadikan perekonomian lebih efektif dan mengurangi risiko *human error* dalam pencatatan pembukuan akibat nominal yang terlalu banyak.

### 4.2. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Salah satu indikator keberhasilan penerapan redenominasi adalah tingkat inflasi setelah kebijakan tersebut diterapkan. Redenominasi akan dianggap gagal jika mengalami inflasi atau hiperinflasi setelah kebijakan diterapkan (Pambudi, Juanda, & Priyarsono, 2014). Sementara bila kita melihat sejarah inflasi, di Indonesia telah mengalami beberapa kali guncangan dan ketidakstabilan dalam nilai mata uang maupun tingkat inflasi.

Penerapan redenominasi juga akan memakan waktu dan biaya transisi yang cukup besar. Mulai dari biaya persiapan, kajian akademik, studi banding, RUU, UU, sosialisasi, hingga implementasi, serta pengawasan dan pemberian sanksi. Dana yang besar juga akan dibutuhkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pencetakan uang kembali untuk mengganti uang lama yang akan diredenominasi (Hardiyanto, 2013).

Hardiyanto (2013), juga memaparkan bahwa redenominasi nominal rupiah juga akan menimbulkan dampak sosiologis. Sebab itu Bank Indonesia, selaku penggagas redenominasi, juga perlu mewaspadai dampak sosial setelah kebijakan tersebut diterapkan, berupa terjadinya trauma bagi masyarakat seperti kebijakan sanering pada zaman Orde Lama, yang akhirnya dapat menimbulkan dampak sosial baru yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap rupiah (Kesumajaya, 2011). Karena kepanikan dalam masyarakat yang berujung pada gejolak ekonomi dapat disebabkan oleh kesalahan pemahaman mengenai redenominasi (Pambudi, Juanda, & Priyarsono, 2014).

### 4.3. Analisis Peluang (*Opportunity*)

Hardiyanto (2013), mengatakan bahwa rupiah akan memiliki kekuatan karena redenominasi membuat nilainya hampir mendekati dollar AS. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, yang mengatakan bahwa salah satu manfaat redenominasi adalah kebanggaan sebagai bangsa. Dalam jurnalnya, Hardiyanto juga menambahkan bahwa saat ini perekonomian Indonesia dinilai masih terbelakang lantaran nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih besar.

Permana (2015), juga menambahkan, dilansir dari [Metrotvnews.com](http://Metrotvnews.com). bahwa pemerintah juga beranggapan bahwa kondisi digit rupiah yang terlalu banyak dinilai kurang mampu mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang sebenarnya sudah baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Kesumajaya (2011), yang menyatakan bahwa apabila di masa lalu suatu negara pernah mengalami inflasi yang tinggi atau kondisi fundamental perekonomian yang kurang baik, hal tersebut dapat dicerminkan dari nilai nominal mata uang yang besar.

Pecahan uang yang terlalu besar menimbulkan ketidaknyamanan dalam bertransaksi, karena transaksi dengan nominal besar akan memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan nominal kecil. Kendala teknis juga terjadi pada transaksi pemerintah, seperti Nota dan RAPBN yang mencapai 16 digit. Di lain sisi, penerapan redenominasi ini juga akan memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat, namun memang yang paling diutamakan adalah kebanggaan (*pride*) (Purwanto D. , 2013).

Liberalisasi perdagangan yang tengah dihadapi Indonesia yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA telah diterapkan di ASEAN sejak tahun 2015 dengan maksud agar stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN terjaga, mendorong peningkatan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta

peningkatan standar hidup masyarakat (Mada, 2017). Posisi Indonesia sebagai anggota MEA secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan kredibilitas mata uang Indonesia. Permana (2015), menambahkan bahwa saat ini nilai tukar rupiah belum dipandang setara dengan mata uang negara ASEAN lainnya karena bila dikonversikan ke USD nilai tukar rupiah masih terbilang kecil. Oleh karena itu, redenominasi dianggap penting untuk mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan kawasan ASEAN (Mada, 2017).

Tak hanya itu, redenominasi akan membuka peluang sukses bagi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi pasar. Karena liberasi perdagangan ini dapat menciptakan peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sewaktu perdagangan dunia masih terbelah-belah karena proteksi yang diterapkan banyak negara terhadap produk impor (Tambunan, 2013). Selain itu, pembentukan integrasi ekonomi ini diharapkan akan memberi manfaat seperti mendorong berkembangnya industri lokal, perbaikan *terms of trade*, dan mendorong efisiensi ekonomi di suatu kawasan ekonomi (Meier & Rauch, 1995).

#### 4.4. Analisis Ancaman (*Threats*)

Salah satu ancaman yang berpotensi timbul akibat redenominasi adalah peningkatan inflasi. Permana (2015), memaparkan bahwa redenominasi akan menyebabkan pembulatan harga ke atas dengan alasan untuk mempermudah transaksi oleh pelaku usaha. Misalkan saja harga awal gula Rp1,5. Dengan alasan mempermudah transaksi, pelaku usaha akan membulatkan menjadi Rp2. Dengan demikian terjadi peningkatan harga gula sebesar 29 persen. Jika hal ini terjadi pada seluruh produk barang dan jasa maka akan mendorong inflasi yang tinggi.

Hardiyanto (2013), juga menjelaskan tahapan pelaksanaan redenominasi, mulai dari sosialisasi hingga penciptaan mata uang baru setelah redenominasi. Tahapan-tahapan tersebut akan menghabiskan waktu sekitar sepuluh tahun. Untuk itu agar redenominasi tidak berpotensi menimbulkan kekacauan yang akan memakan biaya lebih besar lagi, Bank Indonesia harus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, khususnya media massa dalam hal penyebaran edukasi kepada masyarakat (Thalo, 2010). Tak hanya dukungan masyarakat, untuk menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif diperlukan juga dukungan politik dari DPR RI (Priyono, 2013). Karena ancaman terbesar dari penerapan kebijakan redenominasi adalah potensi kegagalan yang akan berdampak buruk pada kondisi makroekonomi itu sendiri.

Walaupun pada dasarnya, pengaruh redenominasi tidak akan berdampak signifikan pada makroekonomi. Hal ini didasarkan pada penelitian

Febrida dan Karolina (2016), yang menunjukkan bahwa pengaruh redenominasi hanya akan memberikan perbedaan pada variabel nilai tukar. Selebihnya tidak berdampak signifikan pada keadaan inflasi, ekspor, penanaman modal asing, dan pertumbuhan ekonomi karena redenominasi hanyalah kebijakan perubahan penulisan nominal mata uang tanpa mengubah nilai riil mata uang tersebut. Berbeda dengan sanering, pemotongan nilai mata uang sekaligus nilai tukarnya, yang akan mengurangi daya beli terhadap barang dan jasa (Mada, 2017).

Permana (2015), menambahkan bahwa perlu adanya pemeliharaan kestabilan makroekonomi, seperti tingkat inflasi yang stabil, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nilai tukar, agar penerapan redenominasi tidak mengalami kegagalan yang akhirnya menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia sendiri. Selanjutnya diperlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat, landasan hukum yang kuat, kondisi sosial politik yang kondusif, *timing* yang tepat, serta dukungan stabilitas kondisi perekonomian internasional.

Namun di lain sisi, Indonesia masih memiliki banyak keterbatasan dalam penyediaan alat transaksi, keterbatasan kapasitas penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai, serta keterbatasan dana untuk pengembangan infrastruktur sistem pembayaran (Hardiyanto, 2013).

#### 4.5. Hasil Analisis SWOT

Hasil penelitian menggunakan analisis SWOT menunjukkan hasil bahwa redenominasi memang perlu diterapkan di Indonesia, namun tidak dalam jangka waktu dekat. Analisis kelemahan internal menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih belum cukup kuat untuk melakukan redenominasi. Ancaman dari sisi eksternal juga dinilai masih lebih lesar dibanding kekuatan internal yang dimiliki. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia masih perlu persiapan yang lebih matang dalam mengantisipasi dampak negatif yang berpeluang timbul akibat adanya redenominasi, baik dari sisi kesiapan ekonomis maupun psikologis masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan adanya dukungan penuh dari lembaga-lembaga negara, khususnya DPR, serta kepercayaan dari masyarakat yang nantinya akan menjadi objek pelaksana kebijakan ini.

#### 4.6. Indikator Kestabilan Makroekonomi Indonesia

Salah satu syarat utama dalam penerapan redenominasi mata uang adalah kondisi perekonomian negara dalam kondisi stabil dan pertumbuhan ekonominya kuat (Permana, 2015). Pengamatan terhadap stabilitas fundamental perekonomian juga penting untuk dilakukan agar pelaksanaan redenominasi benar-benar bisa dilakukan

di *timing* yang tepat. Pada tabel 2 digambarkan kondisi makroekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Berdasarkan data indikator makroekonomi dalam 5 tahun terakhir yang digambarkan dalam Grafik 1, secara umum kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik. Pertumbuhan ekonomi mengalami tren kenaikan yang cukup kondusif walaupun rentang pertumbuhan pada 4 tahun terakhir mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 menuju 2016. Bank Indonesia menjelaskan bahwa tahun 2016 adalah

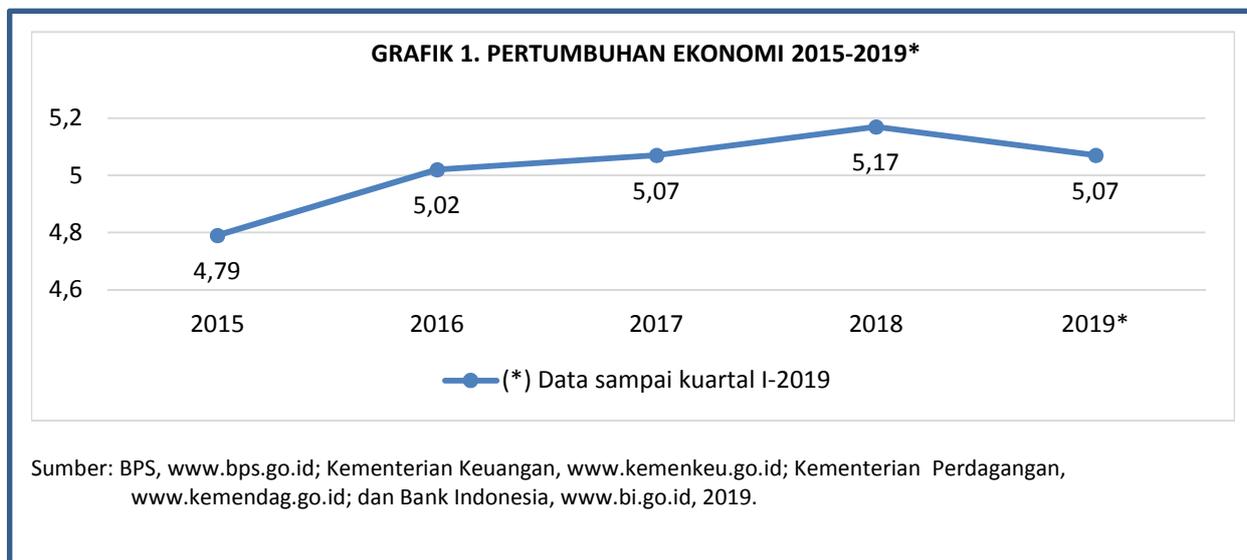
masa pemulihan ekonomi Indonesia setelah pertumbuhannya melambat sejak tahun 2013 sampai 2015. Hal ini disebabkan karena jatuhnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan, serta adanya perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat yang berimbas pada negara-negara *emerging market*, termasuk Indonesia, hingga akhir tahun 2018. Akibatnya di awal tahun 2019, yang masih menjadi masa pemulihan, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,1% hingga akhir kuartal I bulan Maret 2019.

**Tabel 2. Indikator Kestabilan Makroekonomi Indonesia**

| Indikator                     | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019    |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Pertumbuhan ekonomi (persen)  | 4,79   | 5,02   | 5,07   | 5,17   | 5,07*   |
| Inflasi (persen)              | 3,35   | 3,02   | 3,61   | 3,13   | 2,62*   |
| PDB Nominal (miliar USD)      | 11.526 | 12.402 | 13.587 | 14.837 | 3.782*  |
| Defisit Anggaran (PDB persen) | -2,8   | -2,5   | -2,57  | -2,19  | -0,63*  |
| Nilai Tukar (Rp/USD)          | 13.392 | 13.307 | 13.384 | 13.883 | 14.244* |
| Cadangan Devisa (miliar USD)  | 105,9  | 116,4  | 130,2  | 120,7  | 124,5*  |

Ket: \*) Data sampai kuartal I-2019.

Sumber: BPS, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id); Kementerian Keuangan, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id); Kementerian Perdagangan, [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id); dan Bank Indonesia, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2019.

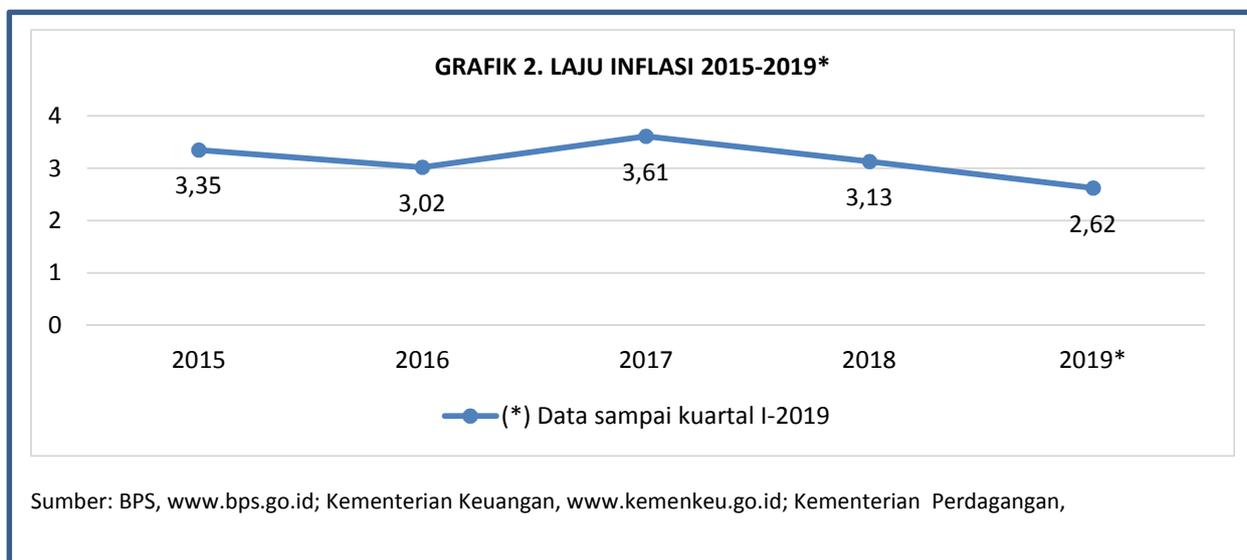


Pada Grafik 2 disajikan pergerakan laju inflasi Indonesia mulai tahun 2015 hingga kuartal I 2019. Dalam 5 tahun terakhir, laju inflasi Indonesia masih tergolong kategori inflasi ringan karena besarnya di bawah 10 persen. Permana (2015) menyatakan bahwa perkembangan harga komoditas pangan dan energi menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini didukung dengan

pernyataan Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa inflasi di tahun 2015 disebabkan oleh peningkatan jumlah permintaan makanan selama natal dan tahun baru, akibatnya harga pangan meningkat. Sementara capaian inflasi di tahun 2016 lebih rendah dibandingkan prediksi Bank Indonesia yang menetapkan sasaran inflasi sebesar 4 persen. Badan Pusat Statistik kembali menambahkan bahwa di

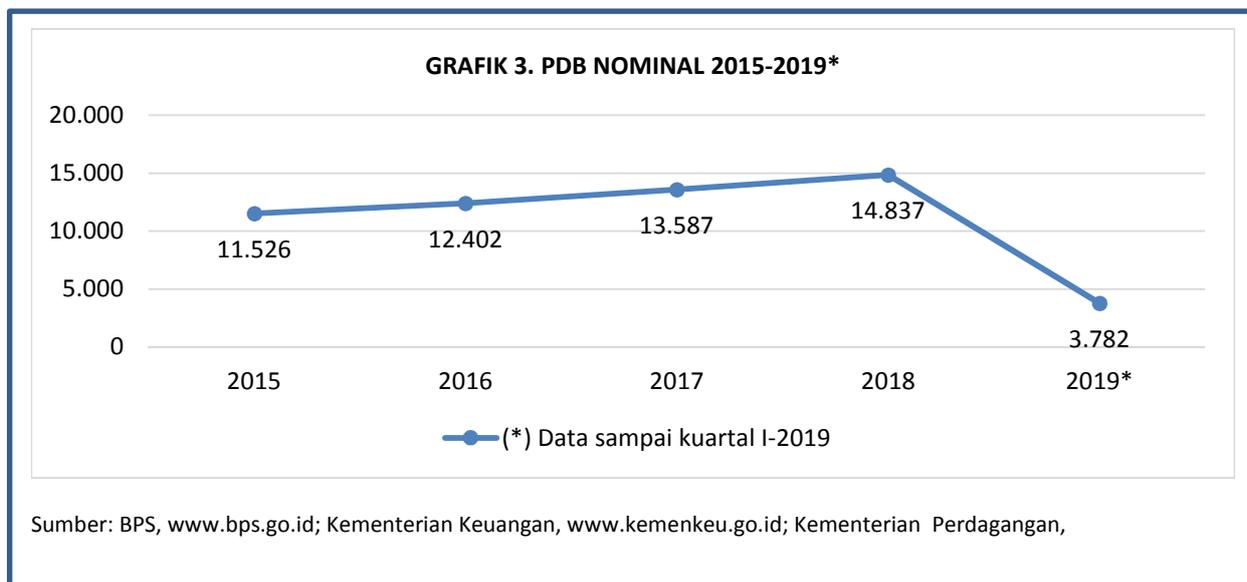
tahun 2017 dan 2018 kenaikan laju inflasi masih disebabkan oleh kenaikan beberapa harga pangan serta komponen transportasi. Untuk tahun 2019, Bank Indonesia telah menargetkan inflasi sebesar 3,5 persen dengan tingkat deviasi 1 persen. Dengan demikian, kinerja pemerintah dalam 5 tahun terakhir dapat dinilai cukup baik dalam mempertahankan

inflasi tetap berada dalam 1 digit (Permana, 2015). Namun masih belum cukup kuat untuk dapat dikatakan stabil, karena untuk melaksanakan program redenominasi rupiah keadaan inflasi harus dalam tren penurunan sementara tingkat inflasi di Indonesia masih mengalami volatilitas walau tidak terlalu signifikan.



Secara umum tingkat Pendapatan Domesik Bruto nominal atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan tiap tahunnya seperti pada Grafik 3. Bank Indonesia menjelaskan bahwa pada tahun 2015, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya untuk pertama kali dalam satu dekade. Namun karena inflasi Indonesia dan defisit transaksi berjalan membaik ke tingkat yang aman, sedangkan rupiah juga mulai stabil terhadap dollar di akhir 2015, Bank Indonesia akhirnya bisa melonggarkan kebijakan moneternya walaupun tetap berdampak pada melambatnya pertumbuhan hingga tahun 2016 (Indonesia-Investments, 2018).

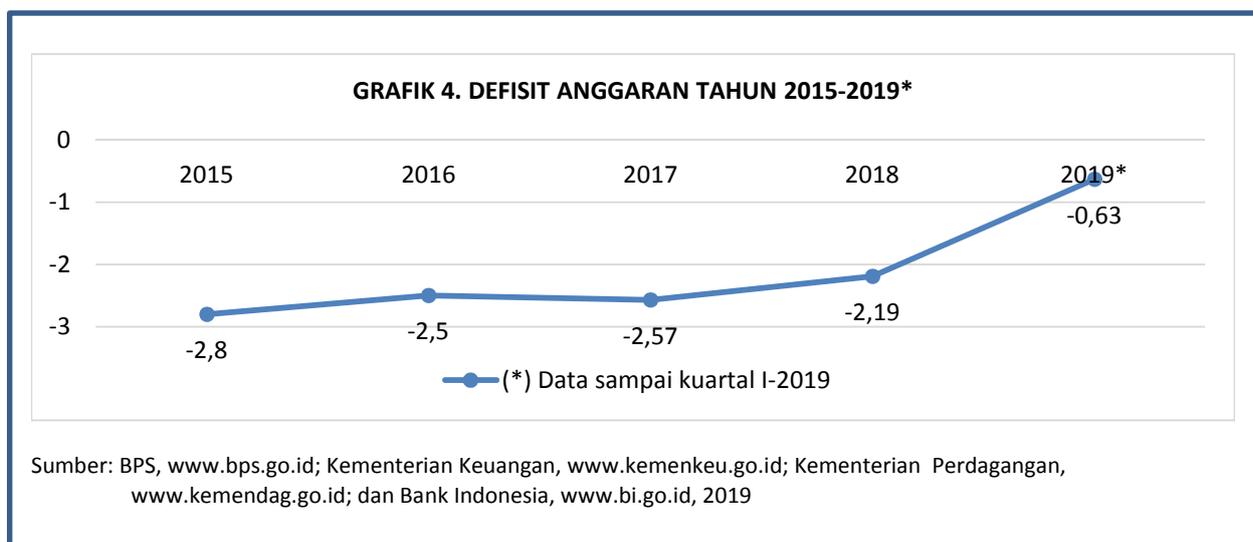
Sementara itu pada Grafik 5, nilai tukar rupiah masih terus berfluktuasi terhadap nilai mata uang USD. Di akhir tahun 2015, rupiah menempati posisi depresiasi paling rendah di kawasan Asia hingga level Rp13.788 per dollar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena menguatnya laju dollar Amerika akibat dari turunnya harga minyak dan sejumlah komoditas lain. Penguatan dollar Amerika Serikat dan pengaruh kenaikan suku bunga The Fed menyebabkan nilai tukar rupiah tetap bertahan pada nilai terendahnya di akhir 2016 sebesar Rp13.463. Namun di tahun 2017, berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia



menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan fundamental neraca pembayaran yang surplus, pasar valuta asing yang membaik, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia, akhirnya mampu membuat pergerakan nilai tukar stabil sepanjang tahun 2017. Nilai tukar rupiah kembali mencapai posisi terendahnya di tahun 2018 hingga mencapai Rp15.300 di bulan Oktober. Pelemahan ini merupakan imbas dari adanya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, keluarnya arus modal asing akibat kenaikan suku bunga The Fed, serta kondisi neraca transaksi berjalan yang defisit. Seorang Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, juga menambahkan bahwa rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2018 merupakan yang terendah sepanjang sejarah dalam 18 tahun terakhir.

pembayaran utang luar negeri dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional. Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat juga ikut memberikan tekanan perekonomian domestik. Namun di akhir 2018, cadangan devisa kembali meningkat hingga level 120,7 miliar USD karena pengaruh penerimaan devisa migas, penerbitan global bonds, dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah (Kemenkeu, 2019).

Secara garis besar, kondisi makroekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 kuartal pertama masih cukup baik, namun masih belum bisa mencapai kestabilan ekonomi. Seperti yang dijelaskan Bank Indonesia bahwa kondisi

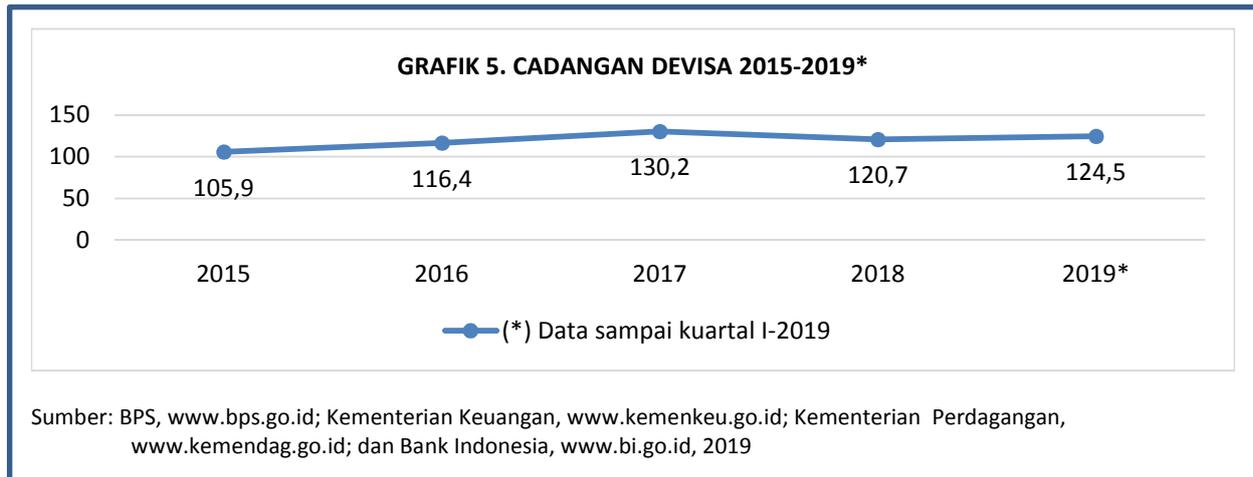


Defisit anggaran yang ditampilkan pada Grafik 4 menunjukkan kondisi yang stabil dalam kisaran -2%. Khoirul Anwar (2014) mendefinisikan defisit anggaran sebagai suatu kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus pada perekonomian dengan membuat pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena dinilai dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja, maka selama ini Indonesia cenderung menerapkan kebijakan anggaran longgar (*loose budget policy*) untuk menaikkan defisit anggaran dan menurunkan surplus anggaran (Abimanyu, 2003). Padahal apabila tidak hati-hati, kebijakan ini dapat memicu kenaikan inflasi karena adanya peningkatan *agregat demand* (Anwar, 2014). Sehingga pemerintah harus mampu mengendalikan defisit anggaran dalam posisi stabil sebagai syarat pelaksanaan redenominasi rupiah.

Kondisi cadangan devisa Indonesia dalam 5 tahun terakhir masih dalam kondisi baik. Pada Grafik 5, cadangan devisa Indonesia sempat menurun hingga level 117 miliar USD akibat penggunaan devisa untuk

pertumbuhan ekonomi masih dalam tahap pemulihan akibat jatuhnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan serta perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat. Selain itu, inflasi tidak dalam tren menurun karena sempat mengalami kenaikan sebesar 0,19% di tahun 2017. Volatilitas nilai tukar rupiah dinilai cukup besar setelah tedepresiasi hingga 15.300 di bulan Oktober 2018. Serta cadangan devisa masih berfluktuasi, seperti yang dijelaskan oleh Bank Indonesia bahwa hal ini terjadi akibat penggunaan devisa untuk pembayaran utang luar negeri dan ketidakpastian pasar keuangan internasional.

Defisit anggaran terus berfluktuasi namun relatif stabil dalam kisaran -2%. Kondisi ini perlu dijaga kestabilannya karena ketersediaan anggaran juga menjadi salah satu penopang penyelenggaraan kebijakan redenominasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila penerapan redenominasi rupiah akan dijalankan, maka Indonesia perlu memperbaiki kondisi makroekonomi dan mencapai tingkat kestabilan dengan tetap mempertimbangkan kondisi ketersediaan anggaran negara.



## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Redenominasi rupiah memiliki banyak manfaat penting bagi perekonomian Indonesia, salah satunya peningkatan kredibilitas rupiah mengingat Indonesia sudah mulai memasuki liberalisasi pasar khususnya di kawasan ASEAN. Tentu kebijakan ini menjadi tonggak penting yang mampu membuka jalan sukses bagi perekonomian kita, karena redenominasi juga akan membuat transaksi ekonomi menjadi lebih efisien melalui digit nominal yang sedikit.

Namun di sisi lain, perlu adanya kajian ulang terkait dampak-dampak yang berpotensi buruk bagi perekonomian. Salah satunya terkait biaya pencetakan uang yang cukup besar dan waktu transisi yang tidak sebentar. Melihat proses persiapan, sosialisasi, hingga penerapan dan pengawasan pasca redenominasi bukanlah hal yang dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Namun diperlukan persiapan yang benar-benar matang yakni sekitar 10 tahun, mulai dari perencanaan, penarikan uang lama secara perlahan agar tidak menimbulkan kepanikan ekonomi mikro, hingga pemerintah yang harus mampu menjaga kestabilan kondisi makroekonomi.

Untuk menghindari kegagalan yang sama seperti tahun 1965, perlu adanya persiapan yang benar-benar matang. Kondisi fundamental perekonomian adalah salah satu yang terpenting. Pemerintah harus mampu melihat secara keseluruhan keadaan makroekonomi dan memastikan redenominasi dilakukan di *timing* yang tepat, yakni saat kondisi ekonomi stabil, laju inflasi terjaga, dan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi baik. Pemerintah juga harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa nantinya setelah redenominasi sudah diterapkan, tingkat harga tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan dan tetap mampu mengendalikan indikator makroekonomi

lainnya. Terlebih lagi, dalam Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dijelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penggunaan anggaran negara pada infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Sehingga, apabila ketersediaan anggaran masih dialokasikan untuk hal lain yang lebih urgen, penerapan redenominasi masih dapat ditunda hingga negara dalam kondisi perekonomian yang baik dan stabil (Pambudi, Juanda, & Priyarsono, 2014).

Bila kita berkaca pada negara yang berhasil menerapkan redenominasi, Turki misalnya, hal itu disebabkan karena dilakukan saat kondisi fundamental perekonomian yang cukup kuat dengan pertumbuhan yang baik, tren inflasi yang menurun, nilai tukar stabil, dan defisit anggaran pemerintah yang terus mengalami penurunan (Permana, 2015). Sementara bisa kita belajar dari kegagalan Brazil yang disebabkan karena redenominasi dilakukan saat kondisi fundamental perekonomian sedang kurang baik dan pemerintah dianggap tidak mampu mengelola indikator makroekonominya. Contoh lain yakni Zimbabwe yang gagal dalam menerapkan redenominasi, karena dilakukan ketika inflasi sangat tinggi sehingga redenominasi semakin memperkuat efek inflasi tersebut (Mada, 2017).

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya membahas apakah redenominasi rupiah menjadi hal yang urgen atau tidak bagi Indonesia saat ini berdasarkan kaitannya dengan keuangan negara dari sisi anggaran negara. Selain itu, metode studi literatur masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya adalah pengukuran urgen tidaknya penerapan redenominasi rupiah hanya berdasarkan kriteria dari literatur sehingga diperlukan adanya penelitian lanjutan untuk mengkaji masalah redenominasi rupiah dengan menggunakan metode kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Abimanyu, A. (2003). *Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amir, A. (2013). Redenominasi Rupiah dan Sistem Keuangan. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1 (2), 91-96.
- Anwar, K. (2014). Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik Tahun VI* (2), 588-603.
- Bank Indonesia. (2005). *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966, Bank Indonesia pada Masa Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bappenas. (2019, April 30). *Rancangan Awal RKP 2020 dan Pendanaannya*. Retrieved Oktober 14, 2019, from [https://musrenbangnas.bappenas.go.id/files/rak\\_orbangpus/RAKORBANGPUS%202019\\_Menteri\\_PPN\\_BAPPENAS\\_Rancangan%20Awal%20RKP%202020%20dan%20Pendanaannya.pdf](https://musrenbangnas.bappenas.go.id/files/rak_orbangpus/RAKORBANGPUS%202019_Menteri_PPN_BAPPENAS_Rancangan%20Awal%20RKP%202020%20dan%20Pendanaannya.pdf)
- Chotimah, C. (2010). *Hubungan Kestabilan Emosi dengan Prestasi Belajar pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Karangom Klaten*. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Chou, W. (2000). Exchange Rate Variability and China's Exports. *Journal of Comparative Economics*, 28 (1), 61-79.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Dogarawa, A. (2007). The Economics of Currency Redenomination: An Appraisal of Central Bank of Nigeria Redenomination Proposal. *MPRA Paper No. 2319*.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Sartz, R. (1998). *Macroeconomics* (7th ed.). Boston: McGraw-Hill Companies, Inc.
- FE, D. (2011). Kajian tentang Rencana Redenominasi Rupiah dalam Sistem Keuangan Jangka Panjang di Indonesia. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputersasi Akuntansi*.
- Febriada, M., & Karolina, L. (2016). Analisis Makro Ekonomi Sebelum dan Sesudah Penerapan Redenominasi Mata Uang. *Economics Development Analysis Journal*, 5 (2), 153-162.
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiyanto, A. (2013). *Analisis Persepsi Pelaku Usaha di Kota Medan terhadap Rencana Redenominasi*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Ichwan, M. (1989). *Adiministrasi Keuangan Negara suatu Pengantar Pengelolaan APBN/D RI*. Yogyakarta: Liberty.
- Ilham, N., & Siregar, H. (2007). Dampak Kebijakan Harga Pangan dan Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi Makro. *Jurnal Agro Ekonomi*, 25 (1), 55-83.
- Indonesia-Investments. (2018, Mei 7). *Produk Domestik Bruto Indonesia*. Retrieved Mei 29, 2019, from <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?>
- Iona, D. (2005). The National Currency Redenomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis. *International Multidisciplinary Symposium Universitaria Simpro*.
- Kemenkeu. (2019, Januari 9). *Cadangan Devisa Desember 2018 Meningkat*. Retrieved Mei 29, 2019, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/cadangan-devisa-desember-2018-meningkat/>
- Kesumajaya, I. (2011). Redenominasi Mata Uang Rupiah Merupakan Bagian dari Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran di Indonesia. *GaneC Swara*, 5 (1).
- Lianto, J., & Suryaputra, R. (2012). The Impact of Redenomination in Indonesia from Indonesian Citizens' Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 40, 1-6.
- Mada, A. (2017). Mendorong Implementasi Redenominasi Rupiah untuk Peningkatan Efisiensi dan Daya Saing Ekonomi Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Value Journal of Management and Business*, 1 (2), 96-111.
- Meier, G. M., & Rauch, J. E. (1995). *Leading Issues in Economic Development*. New York: Oxford University Press.
- Mosley, L. (2005). Dropping Zeros, Gaining Credibility? Currency Redenomination in Developing Nations. *Dept. of Political Science University of North Carolina Chapel Hill, NC*, 1-28.
- Mukhlis, I. (2011). Analisis Volatilitas Nilai Tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dolar. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5 (2), 172-182.
- Nisak, Z. (2014). Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal EKBIS. Fakultas Ekonomi: Universitas Islam Lamongan*.
- Noor, S. (2014, November). Penerapan Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Pemasaran Daihatsu Luxio di Malang. *Jurnal INTEKNA, Tahun XIV, No. 2*, 102-209.
- Palupi, W. T. (2011, Januari 26). Cappucino Cuma Rp 32. *Republika*.
- Pambudi, A., Juanda, B., & Priyarsono, D. (2014). Penentu Keberhasilan Redenominasi Mata Uang: Pendekatan Historis dan Eksperimental. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17 (2), 168-194.

- Permana, S. H. (2015). Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6 (1), 109-122.
- Priyono. (2013). Redenomination : Between Hope and Reality (The study of the implementation of the Redenomination in Indonesia). *International Journal of Business and Management Invention*, 2 (4), 36-40.
- Purwanto, D. (2013). Retrieved from Apa Dampak Jika Redenominasi Tidak Dilakukan:  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/01/23/11130521/Apa.Dampak.jika.Redenominasi.Tidak.Dilakukan>,
- Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Redenominasirupiah.com. (2013b). *Perbedaan redenominasi rupiah dengan sanering rupiah*. Retrieved Mei 27, 2019, from dari  
<http://www.redenominasirupiah.com/perbedaanredenominasi-rupiah-dengan-sanering-rupiah/>.
- Stiglitz, J. (1997). *Economics* (2nd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Subagio, M. (1988). *Hukum Keuangan Negara RI*. Jakarta: Rajawali.
- Suhendra, S. E., & Handayani, S. W. (2012). Impacts of Redenomination on Economics Indicators. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES*, 21.
- Tambunan, T. (2013). Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan tantangan bagi UMKM di Indonesia. *Policy Paper No. 15 Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme*, 1-20.
- Thalo, N. (2010). Manfaat dan Biaya Redenominasi Rupiah. *Update Indonesia: Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, Sosial*, 5 (5), 6-8.
- Wahyu, F. (2012). Pengaruh Inflasi dan Upah terhadap Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1980-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1 (2).
- Wibowo, B. (2013, Februari 21). Ilusi Nilai Uang Redenominasi. *Harian Bisnis Kontan*.